

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustine, Oly Viana, 2019, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok.
- Abidin, Andi Zainal, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Ardhawisastra, Yudha Bhakti 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi ,2006, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- B. M., Pontang Moerad, S.H., 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni.
- Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019, *Modul Penuntutan*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statitik Daerah Istimewa Yogyakarta, *Berita Resmi Statistik : Indeks Pembangunan Manusia (IPM D.I. Yogyakarta Tahun 2019)*, Indeks Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta No. 020/03/34/Th.XXII, 2 Maret 2020.
- Balai Kesatuan dan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPH Yogyakarta Jangka Tahun 2014-2023*, Balai Kesatuan dan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pemerintah Provnsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, 2019, *Standar Pelayanan Balai KPH Yogyakarta*, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana* edisi Agustus 2019.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bemmelen, J.M. van, 1986, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana 2, Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, Bandung.

- Chawick, Bruce A., Bahr, Howard M., Albrecht, Stan L., *Social Science Research Methods* dalam Dr. Sulisytia, M.L., *et al.*, 1991, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Chazawi, Adami, 2012, *Percobaan dan Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggung Jawab dan Hak Asasi Manusia Warga Desa)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Damarraya, Adnin, Ratnasar, Meniy, dan Mutiara, Netty, 2017, *Deforestasi Indonesia Tahun 2015-2016*, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Djauhani, Moh., *et al.* (Ed), 2017, *Hutan Kemasyarakatan Hidup Matinya Petani Miskin*, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan (KpSHK), Bogor.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Gerungen, W. A. , 1983, *Psychology Sosial*, PT. Eresco, Bandung-Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi 2.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indoneisa, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Cetakan Kesembilan, (Edisi Revisi), Djambatan, Jakarta.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., (Ed), 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Jonkers, J.E., 1946, *Handboek Van Het Nederlansch-Indische Strafrecht*, E.J. Brill, Leiden.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2017, *Dari Lacak Kayu Bulatnya ke Lacak Uangnya (Penerapan Anti Pencucian Uang dalam Kejahatan Hutan : Studi Kasus Adelin Lis, Marthen Renow, dan Labira Sitorus)*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

- Mudzakir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Mutijo, *et.al.*, 2016, *Analisis Informasi Statistik Pembangunan Daerah 2016*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan VII.
- Kartanegara, Satochid, 1998, *Hukum Pidana, Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Data dan Informasi Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia : Pentupan Lahan di Indonesia, Deforestasi Indonesia, Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut*, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Batu, Bandung.
- LBH Jakarta, (tidak ada tahun), *Pelatihan Analisa dan Ringkasan Kasus : Mengembangkan Teori dan Ringkasan Kasus untuk Advokasi Kasus-kasus Hak Asasi Manusia di Dalam dan Luar Pengadilan*, LBH Jakarta.
- Mahkamah Agung, 2005, *Naskah Akademis tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, Mahkamah Agung, Jakarta
- Maslin, Mark, 2014, *Climate Change: A Very Short Introduction*, Edisi Ke-3, Oxford University Press, New York.
- Marpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Cetakan II, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, A., 2013, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Bandung, Cetakan II.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan VI.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana : Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, Abdul Karim, 1975, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jilid I, II, dan III, Korps Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peluso, N.L., 1992, *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, Berkeley: University of California Press.
- Muchtar, Masrudi, (tidak ada tahun), *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2015*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rangkuti, S.S., 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sahetapy, J.E., (Ed), 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Sastraidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana I*, C.V.Armico, Bandung.
- Salim, H.S., 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samsul, Inosentius, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Pusat Perencanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI.
- Scgwarzenberger, G, 1965, *The Inductive Approach to International Law*, New York : Oceana, Dobbs Ferry.
- Senawi, Sahid, dan Wardhana, Wahyu, 2011, *Survei dan Pemetaan Hutan*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Sianturi, S.R., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petaham, Jakarta.
- Sofyan, Andi, dan Azisa, Nur, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan-1, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan III.
- Syamsuddin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum : Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan IV.

- Simarmata, Rikardo, dan Steni, Bernadinus, 2017, *Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*, The Samdhana Institute, Sleman.
- Suarga, Riza, 2005, *Pemberantaran Illegal Logging : Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten.
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Piana (Kasus Papua)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nurdjana, Igm., dan Prasetyo, Teguh, Sukardi, 2003, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Malik, Ichsan, *et al.*, (tidak ada tahun), *PAKHTA dan Konflik Tenurial di Indonesia*, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Taird, M.E., dan Tas, Van der, 1957, *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*, Timun Mas, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, *Modul Surat Dakwaan*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Zain, Alam Setia, 1995, *Hukum Lingkungan : Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Artikel Jurnal

- Anindyajati, Titis, *et. al.*, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.
- Arizona, Yance, 2014, ‘Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan mk Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peratan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau, *Wacana Jurnal Transformasi Sosial* No. 33, Tahun XVI.
- Atmadja, “Community Forestry on Government Lands: Forest Framng in East Java, Indonesia”, *Sylvanet*, Vol. 18, No. 2, 2005.
- Anas, Azuar, dan Marlina, “Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh Polres Tapanuli Tengah”, *Mercatoria*, Vol. 11, No. 1, Juni 2018.

- Basang, Tommy J., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Dellneming*", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, Juli 2015.
- Dassir, Muh., "Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaen Luwu Timur," *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. III, No. 1 Mei 2008.
- Djanggih, Hardianto, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid.204/PN.SGM)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18, No. 1, Maret 2018.
- Djanggih, Hardianto, dan Saefudin, Y, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/Pid/Pra/2016/PN Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 3, September 2017.
- Kusumastuti, Ayu, "Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, No. 1, Januari 2015.
- Montolalu, Henly, "Hukum Terhadap Modus Operandi Pengrusakan Hutan (*Illegal Logging*) Dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", *Lex Et Societatis*, Vol. VI.No. 7, September 2018.
- Maryudi, Ahmad, "Kegagalan Pengelolaan Hutan Jawa", *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Vol. 25, No. XIII, 2011.
- Muhajir, Mumu, "Anggapan Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Mekanisme Reducing Emissions from Deforestation dan Forest Degradation (REDD) Sebagai Kasus," *EPISTEMA Working Paper*, No. 10, Tahun 2010.
- Probowati R., Yusti, "Putusan Hakim pada Perkara Pidana : Kajian Psikologis," *Buletin Psikologi*, Tahun III, No. 1, Agustus 1995.
- Mudzakkir, "Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik: Kajian Putusan No. 37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel.," *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 3, Tahun 2004.
- Nurrani, Lis dan Tabbla, Supratman, "Persepsi dan Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Sumberdaya Alam Taman Nasional Aketajawe Llobata di Provinsi Maluku Utara", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 10, No.1, Maret 2013.
- Nyoman, I., "Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia," *Jurisprudence*, Vol. 2, No.1, Maret 2005.
- Prihatsanti, Unika, *et.al.*, 2018, "Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi," *Buletin Psikologi*, Vol. 26.

- Safiuddin, Sahrina, “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,” *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 1, Februari 2018.
- Santoyo, “Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, September 2008.
- Sayogie, Frans, “Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum: Analisis Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010,” *Buletin Al-Turas, Mimbar Sejarah, Sasatra, Budaya, dan Agama*, Vol. XXIII, No. 1, Januari 2017.
- Sepang, Giant K. Y., “Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP,” *Lex Crimen* Vol. IV, No.8, Oktober 2015.
- Moteiro, Josef M., “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No.2, April 2007.
- South, Nigel, “Green Crimiology: Reflections, Connections, Horizons,” *IJCJ&SD*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2014.
- Hodgetts, D.J., dan Stolte, O.M.E., “Case-based Research in Community and Social Psychology : Introducton to the Special Issue,” *Jornal of Community & Applied Social Psychology*, Vol. 22, 2013.
- Suprantio, Steven, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Auditu” dalam Peradilan Pidana : Kajian Putsan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010,” *Jurnal Yudisial* Vol. 7, No. 1, April 2014.
- Simanjuntak, Enrico, “Peran Yurispidensi dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.
- Mareta, Josefhin, “Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Konsep Keamanan Nasional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 1, April 2016.
- Ponglabba, Chant S.R., “Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 6, Agustus 2017.
- Wiro, Aditya, “Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex es Societatis*, Vol. II, No.6, Juli 2014.
- Yurista, Ananda Prima, “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 01, Juni 2016.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Apriliani, Silvia Wulan, 2015, *Peranan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana : Studi pada Pengadilan Negeri Ungaran*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

- Dewi, Indah Novia, *et.al*, (tidak ada tahun), *Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya melalui Program Kehutanan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Disertasi, Program Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fasrial, R. Subhan, S.H., 2015, *Implementasi Teori Tujuan Pemidanaan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Fuady, Muhammad Irham, 2012, *Faktor-Faktor Non Yuridis sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Habibie, Muhamad Hafidz, 2017, *Analisis Yuridis Mes Rea (Sikap Batin Jahat) dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Huda, Arsha Nurul, 2016, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Perantara dalam Jual Beli Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Isnani, Masykur, 2012, *Peran Kementerian Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kuncoro, Veronica Adityo, 2018, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Nurjaman, Aji Sukmono B., (tidak ada tahun), *KPH Yogyakarta : Membangun Model Pengelolaan Hutan yang Mandiri dan Profesional*, Seri 1 dari Kerjasama Penelitian “Peningkatan Efektivitas Model Pranata dan Tata Kelola dalam Mencapai Pengelolaan Hutan Lestari: Studi Kasus Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta antara Center for International Forestry Research dengan Fakultas Kehutanan UGM dan Balai KPH Yogyakarta” di bawah Proyek Penelitian Kanoppi 2 : Membangun dan Mempromosikan Wana Tani berbasis asar dan Integrasi Pengelolaan Lanskap untuk Petani Hutan di Indonesia, Jakarta.
- Sari, Dian Permata, 2015, *Konsepsi Putusan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa “S” Mantan Bupati Lampung Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sidharta, B. Arief, “Peranan Praktisi Hukum Dalam Perkembandan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, usat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian UNPAD, Nomor Perdana: 1-1999, Bandung.

Soeroso, Fajar Laksono, *et.al.*, 2016, *Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi : Studi Implementasi Putusan No. 95/PUU-XII/2014 di Masyarakat Adat Pekasa, Sumbawa, NTB*, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunitasi (P4TIK), Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Subakti, Natangsa, 2011, *Delik Khusus*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3. dalam Wijayanto, 2016, *Analisis Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

#### **Pidato, Diskusi, Seminar**

Afot, Marselinus, “Uji Konsep Draf RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” STKIP St. Paulus Ruteng, Labuan Bajo, 9 Desember 2016.

Hiariej, Eddy O.S. dalam diskusi ilmiah bertajuk “Tuduhan Makar dan Teror Data Pribadi terhadap Kebebasan Akademik” dengan topik “Menelaah Tuduhan Tindak Pidana Makar dalam Kegiatan Diskusi yang Seharusnya Diselenggarakan oleh CLS pada 29 Mei 2020,” tanggal 3 Juni 2020.

Poernomo, Bambang, “Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Pidato*, Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Juli 1989.

WWF Provinsi NTB, “Pengumpulan Data Penyusunan NA dan Draf RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan”, *FGD*, Mataram, 6 September 2010.

Dinas Kehutanan Provinsi NTB, “Pengumpulan Data Penyusunan NA dan Draf RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” *FGF* Mataram, 6 September 2016.

#### **Artikel dalam Antologi dengan Editor**

Ardana, R., 2000, *Desa Mengepung Hutan*, dalam I. Bachtiar (ed.) *Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Hutan Partisipatif Terintegrasi Sebagai Implementasi PHBM di Randublatng*, Yogyakarta: Arupa, Diakses dari <http://www.arupa.or.id/download/prosidingsemiloka.pdf>

### Artikel Majalah atau Koran

Sumardjono, Maria S.W., “Jalan Tengah Pengaturan Masyarakat Hukum Adat”, Opini, *Kompas*, 28 September 2018.

Duswara, Machudin, H. Dudu, “Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan”, *Majalah Hukum Varia Peradilan* Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006, Ikahi, Jakarta.

### Internet

Alexadelmio, “Profil Potensi Desa,” <https://www.banyusocoplayen.desa.id/first/artikel/59>, diakses 30 Mei 2020.

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, “Berita Resmi Statistik, Senin, 2 Maret 2020”, [https://yogyakarta.bps.go.id/backend/materi\\_ind/materiBrsInd-20200302123755.pdf](https://yogyakarta.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200302123755.pdf) diakses 30 Mei 2020.

Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum,” dari [www.jimly.com](http://www.jimly.com) diakses 2 April 2020.

Bisnis.com, “Kemiskinan: 48,8 Juta Orang Tinggal di Kawasan Hutan”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160930/9/588396/kemiskinan-488-juta-orang-indonesia-tinggal-di-kawasan-hutan> diakses 8 Maret 2020.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding),” <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>, diakses 2 April 2020.

Forest Watch Indonesia, “Di balik Ruaknya Hutan Indonesia,” [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/02/IntipHutan\\_April03\\_all.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/02/IntipHutan_April03_all.pdf), diakses 23 Februari 2020.

Forest Watch Indonesia, “Potret Keadaan Hutan Indonesia”, <http://www.fwi.or.id/illegal%20logging/indeks.shtml> diakses 17 Februari 2016.

Girisuko-panggung.desa.go.id, “Wilayah Desa Girisuko,” <https://www.girisuko-panggung.desa.go.id/first/artikel/33>, diakses 5 Mei 2020.

Moch Prima Fauzi, “Kerja Sama Perubahan Iklim Indonesia Norwegia Masuki Fasi Ke-3”, <https://news.detik.com/berita/d-4344470/kerja-sama-perubahan-iklim-indonesia-norwegia-masuki-fase-ke-3>, diakses 23 Februari 2020.

Hasanah, Sovia, “Bisakah Dihukum Jika Menebang Kayu Hutan Di Dekat Rumah”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ac285f1b4/b>

isakah-dihukum-jika-menebang-kayu-hutan-di-dekat-rumah/ diakses 2 Juni 2020.

Suramenggala, Imam, "Kemiskinan: 48,8 Juta Orang Tinggal di Kawasan Hutan", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160930/9/588396/kemiskinan-488-juta-orang-indonesia-tinggal-di-kawasan-hutan>, diakses 8 Maret 2020.

KBBI Daring, "Pengertian Masyarakat", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>, diakses pada 17 Februari 2020.

KBBI Daring, "Fakta," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fakta>, diakses 10 Mei 2020.

KBBI Daring, "Isu," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isu>, diakses 10 Mei 2020

KBBI Daring, "Sekeliling," diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sekeliling>, diakses 17 Februari 2020.

KBBI Daring, "Pertimbangan," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan>, diakses 23 Mei 2020.

KBBI Daring, "Timbang," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/timbang>, diakses 23 Mei 2020.

KPH Yogyakarta, "Pembelajaran KPH Yogyakarta," [http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=196](http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=196), diakses 10 April 2020.

Puspita, Lona, "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Prinsip *Primum Remedium*," <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lzQnumGvRcAJ:https://osf.io/epy6n/download+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses 2 Maret 2020.

Priyanto, Anang "Citra Hakim dan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", diakses dari [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/anang-priyanto-sh-mhum/CITRA%20HAKIM%20DAN%20PENEGAKAN%20HUKUM\(tulisan\).pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/anang-priyanto-sh-mhum/CITRA%20HAKIM%20DAN%20PENEGAKAN%20HUKUM(tulisan).pdf), diakses 10 Februari 2020

Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, "Standar Prosedur Manajemen Tindak Pidana Umum Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah," <http://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2017/03/sop-penyidikan.pdf>, diakses 30 Mei 2020.

Repository.Unhas.ac.id, "Pengantar Kriminologi," <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7181/Buku%20Pengantar%20KRIMINOLOGI.pdf?sequence=1>, diakses 10 Mei 2020.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Melhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1151).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dnas Kehutanan dan Perkebunan.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , 8 Desember 2015).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tuai di Provinsi Maluku, 18 Juni 2008.
- Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2018/PN Wno tentang Kasus Pencurian Kayu oleh Terdakwa Prawoto Alias Komplong bin (Alm) Arjo Sucipto, 12 April 2018).
- Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2018/PN Wno tentang Kasus Pecurian Kayu oleh Terdakwa Terdakwa Sudarsono Alias Gendor Bin Sarjono Gutun, 4 November 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 12 Agustus 2011.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 K/Kr/1969 tentang Kasus Jual Beli Vespa Bekas.

## **Wawancara**

Forestayanto, Ade Mei, Staf Bidang Rehabilitas dan Konservasi Alam, Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara 31 Oktober 2019 di Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hendratmoko, Ratna, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Wawancara tanggal 30 Oktober 2019, melalui aplikasi pesan singkat *Whatsapp*.

Hiariej, Eddy O.S., Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Wawancara tanggal 14 Maret 2020, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Kurniadi, Himawan, Kepala Divisi Advokasi dan Kawasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Eksekutif Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawancara tanggal 19 November 2019 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kricak, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Malik, Abdul, Kepala Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Wawancara tanggal 29 November 2019 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

Parjio, Kepala Bagian Daerah Hutan (BDH) Paliyan, Wawancara tanggal 30 Desember 2019, di Bagian Daerah Hutan (BDH) Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pratiwi, Melia Nur, Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari Wawancara tanggal 13 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Sembiring, Boy, Manajer Kajian Strategis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Eksekutif Nasional, Wawancara tanggal 26 Desember 2019 melalui aplikasi pesan singkat *Whatsapp*.

Setiawan, Agung Budi, Hakim yang Memeriksa Perkara dengan Nomor Register 132/Pid.B/LH/2019/PN Wno, wawancara tanggal 13 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Setyowati, Nataline, Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, Wawancara tanggal 7 Januari 2020, di Pengadilan Negeri Wonosari.

Sugimin, Kepala Bagian Daerah Hutan (BDH) Playen, Wawancara tanggal 30 Desember 2019, di Bagian Daerah Hutan (BDH) Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sulistiono, Agung, Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara dengan Nomor Register 35/Pid.B/LH/2018/PN Wno, Wawancara tanggal 7 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Tjahyono, Wawan Setiyo, Ahli Tindak Pidana Perusakan Hutan, Wawancara tanggal 28 November 2019, di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.